



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2025



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Bapenda untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 di Bapenda Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2025.

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Bapenda Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda	II-12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda	II-14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-14
2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	II-27
BAB III Tujuan dan Sasaran Bapenda	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda	III-4
3.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda	IV-1
BAB V Penutup	V-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);





4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia





- Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);





22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025; dan
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Purwakarta.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Bapenda sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2023 dan Capaian Renstra





Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan dan Sasaran Bapenda

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda

BAB V : Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Keuangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2023 telah selesai dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2025 yang secara keseluruhan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, pelaksanaan Kinerja Bapenda Kabupaten Purwakarta ditunjang dengan Belanja Urusan Perangkat Daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Bapenda Kabupaten Purwakarta menerima alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 32.905.507.080,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 Program, 9 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,91% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 28.791.679.831,00 (87,50%), seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
di Bapenda Kabupaten Purwakarta s.d Bulan Desember 2023

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.243.900	59.617.300	50,85	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	12.604.000	8.333.300	66,12	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.354.200	8.434.200	54,93	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.705.700	11.331.700	82,68	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.464.000	7.058.100	52,42	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.678.100	5.218.100	44,68	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.487.900	5.027.900	43,77	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.529.873.227	19.524.321.461	90,68	100,00	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang Bulan	60 Orang Bulan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.194.300	60.720.300	96,09	100,00	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
-	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.628.900	2.334.900	20,08	100,00	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Trivulanan Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Trivulanan Semesteran SKPD	6.834.400	3.834.400	56,1	100,00	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Trivulanan Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Trivulanan Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.203.400	10.823.400	71,19	100,00	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.797.900	6.757.900	62,59	100,00	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.979.100	2.939.100	42,11	100,00	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	17.625.000	70,5	100,00	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan penulsi	10 Orang	11 Orang
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.750.000	116.250.000	83,78	100,00	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket
-	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	120.000.000	119.880.000	99,9	100,00	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	24.280.700	24.178.000	99,58	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	470.036.200	349.572.900	74,37	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.980.000	14.862.000	99,21	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.072.200	268.068.000	80,73	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	443.385.550	356.335.000	80,37	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.800.000	80	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	184.800.000	184.800.000	100	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	267.136.344	98,94	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	66.000.000	78.000.000	118,18	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	99.272.800	49,64	100,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Pengadaan Mebel	99.266.500	99.265.000	100	100,00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	580.962.000	463.900.000	79,85	100,00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	15 Unit	15 Unit
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.687.500	0	0,00	100,00	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran	
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	628.024.575	586.292.039	93,35	100,00	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.283.538.728	1.852.768.914	81,14	91,60	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Laporan
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.500.000	6.412.700	41,37	100,00	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000	27.314.700	99,33	100,00	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.100.000	127.875.800	85,19	92,00	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50 Unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.050.000	151.341.560	86,46	91,42	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	64 Unit
-	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	854.566.800	688.758.520	80,6	100,00	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2 Unit
-	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100	100,00	Jumlah Pemeliharaan	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 Unit





RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran	
		Rencana	Realisasi	Kuangan	Fisik		Indikator	Target
9	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					Barang Milik Daerah		
-	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100.000.000	0	0,00	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	1 Dokumen
-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	185.468.300	83.360.300	44,95	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.	12 Laporan 0 -
-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	86.400.000	86.290.400	99,87	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Kegiatan
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	239.387.700	209.364.588	87,46	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Jenis 0 -
-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	509.915.400	468.832.084	91,94	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Jenis Pajak 0 - 8 Jenis Pajak 0 -
-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	450.000.000	99.800.000	22,18	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	6 Aplikasi
-	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	344.180.500	329.287.150	95,67	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPI nya Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPI nya	6 Perusahaan 17 Kecamatan
-	Penetapan Wajib Pajak Daerah	209.999.800	209.153.980	99,6	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	452232 NOP
-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	325.571.500	306.883.000	94,26	100,00	Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan
-	Penagihan Pajak Daerah	1.281.100.000	1.177.564.891	91,92	100,00	Tercapainya Kegiatan	Jumlah Kegiatan Bimtek Penagihan Pajak Daerah	1 Kegiatan 12 Laporan





No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	31.399.900	28.064.500	89,38		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan, Pengendalian, dan Pengawasan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Penyebaran SKPD	12 Laporan	12 Laporan
-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	141.598.500	125.763.400	88,82		Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan
-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.935.700	35.854.200	97,07		Tercapainya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Pengendalian Potensi Pajak Daerah (Uji Petik)	4 Kegiatan 12 Laporan	4 Kegiatan 12 Laporan
TOTAL		32.905.507.080	28.791.679.831	87,50	95,91		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan





Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00 %, mengingat sub kegiatan tersebut merupakan lingkup sub kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Bapenda Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2023 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2023, maka perlu dicermati kembali Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 berdasarkan pada outcome setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Badan Pendapatan Daerah									
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	KEUANGAN									
5	02	01	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	A Predikat		A Predikat		
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah							
5	02	01	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98 Persen	100 Persen	100 Persen		96 Persen		
			Persentase Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Yang							
			Dimplementasikan Dibandingkan Dengan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan							
5	02	01	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		3 Dokumen	7 Dokumen	2,3
			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		3 Dokumen	7 Dokumen	2,3
5	02	01	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Yang	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		3 Dokumen	7 Dokumen	2,3

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bappeda.purwakarta.go.id



Kode	Usuran / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	10 Laporan	10 Laporan	9 Laporan	9 Laporan		29 Laporan	2,9
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen				10 Dokumen	3
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan	3 Jasa	3 Jasa	3 Jasa	3 Jasa		9 Jasa	3
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		15 Laporan	3
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio Pajak Daerah Rasio retribusi daerah Persentase capaian PAD Rasio Keterlaksanaan Piutang Pajak Daerah	0,88 Persen 12,30 Persen 50,34 Persen 4,84 Persen 88,40 Persen 10,00 Persen	0,78 Persen 12,30 Persen 49,34 Persen 4,23 Persen 88,50 Persen 9,00 Persen				0,83 Persen 12,65 Persen 49,84 Persen 4,53 Persen 88,95 Persen 9,50 Persen	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15 Laporan	15 laporan	13 Laporan	13 Laporan		42 Laporan	2,8





Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran mencapai sebesar Rp. **34.424.748.125,00** terdiri atas 2 Program, 9 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran. Berdasarkan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bapenda Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat Usulan Kegiatan yang setelah diinventarisasi belum sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah dicanangkan pada Renstra maupun Renja Bapenda.
- b. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda dalam Pencapaian Indikator Kinerja belum didukung dengan ketersediaan Data-data yang memadai dan sistem kerja Stakeholder Pendukung secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap Kualitas Penyusunan Hasil Kajian.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, maka pada Tahun 2024 Bapenda Kabupaten Purwakarta menyusun Strategi:

- a. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
- b. Menyusun Dokumen Perencanaan Peningkatan Pajak Daerah yang Baik, Berkualitas dan Sistematis; dan
- c. Menyediakan Kebutuhan Kajian Peningkatan Pajak Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pajak Daerah Yang Akurat.

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian / Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan Peningkatan Pajak Daerah; dan
- c. Menyusun Kajian-Kajian Peningkatan Pajak Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pajak Daerah.



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta merupakan Unsur Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan *pendapatan Daerah*;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan sebagian fungsi bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan. Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan analisa dan pengembangan terkait pelayanan, pengolahan data, verifikasi dan penetapan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisa dan pengembangan terkait pelayanan, pengolahan data, verifikasi dan penetapan;
- e. *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa dan pengembangan* terkait pelayanan, pengolahan data, verifikasi dan penetapan;
- f. pengelolaan administrasi di bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.



Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing - masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan, keterkaitan dalam pencapaian kinerja pelayanan Bapenda dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator capaian SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga dalam pelaksanaannya di masa mendatang perlu dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel 2.3 .

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, BAPENDA Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan SDM Bapenda yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Kualitas SDM juga menjadi permasalahan tersendiri oleh karena tenaga teknis yang dimiliki masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan dalam pengelolaan pajak daerah. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
- b. Adanya sistem self-assessment memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak. Disamping kadang masyarakat enggan untuk membayar pajak oleh karena mereka belum mengerti benar mengenai pentingnya fungsi pajak, terlebih mereka belum merasakan secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayarkan;
- c. Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem prosedur maupun komputerisasi; dan Akurasi basis data pajak daerah yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi pajak daerah yang sebenarnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 seperti yang telah tersaji pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					36,812,578,527	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				36,812,578,527	
	KEUANGAN				36,812,578,527	KEUANGAN				36,812,578,527	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Diimplementasikan Dengan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	96%	125,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Diimplementasikan Dengan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	96%	125,000,000	

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30,000,000	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	
	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	20.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun		22.048.078,527	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun		22.048.078,527	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Org/Bln	21.998.078,527	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Org/Bln	21.998.078,527	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	20.000.000	





Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan Lanjut	Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1Dokumen	15,000,000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan Lanjut	Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1Dokumen	15,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1Laporan	15,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Disusun		65,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Disusun		65,000,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	15,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	15,000,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	15,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	15,000,000



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun		250,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun		250,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	100,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun		1,907,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun		1,907,000,000	



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	600,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	600,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6,000,000	
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	200,000,000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	200,000,000	



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	36,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	36,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun		700,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun		700,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000	
	Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	50,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	50,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan		2,840,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan		2,840,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	15,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	625,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	625,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,200,000,000	



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan		977,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan		977,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	27,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	27,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	200,000,000	
	Pemeliharaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	50,000,000	Pemeliharaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	50,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	200,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	200,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	500,000,000	



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio PAD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio Pajak Daerah Rasio retribusi daerah Persentase capaian PAD Rasio Keterlagihan Piutang Pajak Daerah			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio PAD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio Pajak Daerah Rasio retribusi daerah Persentase capaian PAD Rasio Keterlagihan Piutang Pajak Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		3.350.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		3.350.000.000	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1Dokumen		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1Dokumen	200.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1Dokumen	200.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1Dokumen	200.000.000	



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1Laporan	200,000,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1Laporan	200,000,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1Unit	200,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1Unit	200,000,000	
	Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1Laporan	400,000,000	Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1Laporan	400,000,000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1Laporan	700,000,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1Laporan	700,000,000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Purwakarta	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	500 Objek Pajak	200,000,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Purwakarta	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	500 Objek Pajak	200,000,000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	452600 Dokumen	250,000,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	452600 Dokumen	250,000,000	





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	200.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	200.000.000	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	452600 Dokumen	100.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	452600 Dokumen	100.000.000	
	Penagihan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	452600 Dokumen	800.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	452600 Dokumen	800.000.000	
	Penyelesaian Keberaian Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberaian Pajak Daerah	300 Dokumen	100.000.000	Penyelesaian Keberaian Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberaian Pajak Daerah	300 Dokumen	100.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40 Dokumen	200.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40 Dokumen	200.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	100.000.000	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan bidang fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 terdapat **8 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** diantaranya yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 8 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas diantaranya yakni:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;

Pembangunan Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial. mendasar, termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Berikut Tahapan Transformasi Sosial :

- a. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social;
- b. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif;
- c. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan; dan
- d. Manusia Indonesia yang unggul



2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;

Pembangunan ekonomi Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktura penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoekonomi. Di samping itu, transformasi ekonomi juga merupakan kunci untuk mewujudkan Indonesia ke luar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap atau MIT). Perekonomian juga akan lebih diarahkan untuk berorientasi ekspor nilai tambah tinggi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan perekonomian menjadi lebih efisien dan produktif, sehingga memperkuat sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang. Berikut Tahapan Transformasi Ekonomi :

- a. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi;
- c. *Economic Power House* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh;
- d. Negara Berpendapatan Tinggi.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset negara, antara lain melalui mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Berikut tahapan Transformasi Tata Kelola :

- a. Kelembagaan tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil



- b. Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN Sejahtera, proporsional, dan kompeten, simplifikasi regulasi berbasis TI, partai politik yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipatif
- c. Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, lembaga tunggal regulasi, serta masyarakat sipil mandiri
- d. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif

4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, keberhasilan transformasi secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah perlu didukung oleh penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor pemampu.

Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia meliputi (i) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial, (ii) Stabilitas Ekonomi Makro, serta (iii) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

Terkait dengan arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, terdapat lima sasaran utama, yaitu (i) terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM; (ii) terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia; (iii) terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak; (iv) terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; serta (v) terwujudnya kebijakan luar negeri yang adaptif guna menjadi negara kunci di kawasan yang kuat dan berpengaruh. Berikut Tahapan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia :

- a. Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan;
- b. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, serta Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi Transformasi dan Pembangunan;
- c. Indonesia yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan memimpin di kawasan; dan



- d. Indonesia yang berdaulat, aman dan damai serta berpengaruh dan memimpin dalam tatanan dunia.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga. secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan.

Sebagai landasan terwujudnya Indonesia Emas 2045, ketahanan sosial budaya dan ekologi dapat tercapai melalui kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya (i) beragama maslahat dan berkebudayaan maju, (ii) keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, (iii) lingkungan hidup berkualitas, (iv) berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta (v) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Berikut Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :

- a. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan;
- b. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif,
- c. Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan; dan
- d. Mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan

8. Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, Visi dan Misi



pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 yaitu: **"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"**.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah; dan
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda :

1. Tujuan Renja Bapenda adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel.
2. Sasaran Renja Bapenda adalah meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatnya maturitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2025 terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki Indikator: Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- + Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD



- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- + Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- + Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- + Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- + Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- + Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- + Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



✚ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Mebel
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini memiliki Indikator: Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

✚ Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e) ~~Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah~~
- f) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- j) ~~Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah~~
- k) Penagihan Pajak Daerah
- l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- o) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 di Bapenda Kabupaten Purwakarta:



TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PURWAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Pendapatan Daerah								
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				37,330,539,558				38,507,520,650
5	KEUANGAN				37,330,539,558				38,507,520,650
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5	01	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Purwakarta	APredikat	29,330,539,558	APBD		APredikat	29,407,520,650
5	02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	98Persen 98Persen	125,000,000	APBD		100Persen 100Persen	125,000,000
5	02	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
5	02	Persentase Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Yang Diimplementasikan							
5	02	Dibandingkan Dengan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan							
5	02	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Purwakarta	3Dokumen	22,081,039,558	APBD		3Dokumen	22,108,020,650
5	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
5	02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	3Dokumen	65,000,000	APBD		3Dokumen	65,000,000

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2026

www.bapenda.purwakarta.go.id



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun	Purwakarta	3Dokumen	350,000,000	APBD		3Dokumen
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	Purwakarta	10Laporan	2,042,000,000	APBD		10Laporan
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun	Purwakarta	5Dokumen	850,000,000	APBD		5Dokumen
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan	Purwakarta	3Jasa	2,840,000,000	APBD		3Jasa
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan	Purwakarta	5Laporan	977,500,000	APBD		5Laporan
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio Pajak Daerah Rasio retribusi daerah Persentase capaian PAD Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	Purwakarta	0.88 Persen 13,00 Persen 50,34 Persen 4,84 Persen 88,40 Persen 10,00 Persen	4,000,000,000	APBD		0.93Persen 13,35Persen 50,84Persen 5,14Persen 89,85Persen 10,50 Persen
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Purwakarta	15Laporan	4,000,000,000	APBD		15Laporan





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah	
									12	13	
2	3	4	5	8	9	10	11				17
	Badan Pendapatan Daerah				32.817.569.395,00						
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.221.813.648,00						
5	KELUANGAN				10.221.813.648,00						
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	APredikat	A Predikat	6.671.838.728,00						
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100Persen	98 Persen	125.000.000,00					Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	
		Persentase Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Yang Diimplementasikan	100Persen	98 Persen						10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	
		Dibandingkan Dengan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan									
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	0001							10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Nagri Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	0002							10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
5	02	2.01	0003	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	2.01	0004		1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	2.01	0005	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	2.01	0006		1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
5	02	2.01	0007	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	2.02		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	3Dokumen	50.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah						
								Nasional						
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Dokumen Laporan	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Disusun	30dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun	3Dokumen	250.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH



Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah				
									Nasional				
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	10Laporan	10 Laporan	1.638.000.000,00	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel//Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	120.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel//Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel//Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	880.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel//Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	85.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel//Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel//Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
5 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun	5Dokumen	5 Dokumen	420.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH



Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah				
									Nasional				
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan	3Jasa	3.176.338.728,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	625.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.536.338.728,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah		
								Nasional		
5	02	01	2.09							
				5 Laporan	947.500.000,00					Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5	02	01	2.09							
				1 Unit	27.500.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09							
				40 Unit	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09							
				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09							
				50 Unit	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09							
				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BADAN PENDAPATAN DAERAH



RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id



Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	89,85 Persen 13,35 Persen 10,50 Persen 0,93 Persen 5,14 Persen 50,84 Persen	0,88 Persen 10,00 Persen 13,00 Persen 13,00 Persen 4,84 Persen 50,34 Persen 89,40 Persen 89,40 Persen	3.549.974.920,00				
			Rasio PAD							
			Rasio Keteragihan Piutang Pajak Daerah							
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD							
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD							
			Rasio retribusi daerah							
			Rasio Pajak daerah							
			Persentase capaian PAD							
			Persentase capaian PAD							
5	02	04	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15 Laporan	3.549.974.920,00				Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	
5	02	04	2.01							
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01							
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01							
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	170.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01							
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit						
5	02	04	2.01							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit						





Kode	Unsuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Daerah						
								Nasional						
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	520.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	452600 Dokumen	452.600 Dokumen	211.148.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000 Layanan	12.000 Layanan	200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	452600 Dokumen	452.600 Dokumen	86.636.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	452600 Dokumen	1.200.190.920,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	BADAN PENDAPATAN DAERAH
J U M L A H								32.817.569.395,00					



BAB V PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Renja Bapenda Kabupaten Purwakarta selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bapenda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bapenda Kabupaten Purwakarta. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staff Bapenda Kabupaten Purwakarta sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapenda Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025.

Purwakarta, Juli 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TA. 2025

www.bapenda.purwakarta.go.id

